

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Turki berbatasan langsung dengan wilayah Armenia (lihat gambar 1.1). Meskipun demikian, Turki dan Armenia tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi atau bahkan memburuk. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang tidak kunjung usai diantara kedua negara. Salah satunya adalah terkait dengan konflik di wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah kantong (*enclave*) Armenia, Nagorno-Karabakh di wilayah negara Azerbaijan.

Gambar I.1 Peta Wilayah Turki dan Armenia



Sumber: <http://suffragio.org/wp-content/uploads/2013/02/armenia-map.jpg> (diakses pada 10 Juni 2014)

Penempatan wilayah Nagorno-Karabakh di Azerbaijan merupakan hasil pembagian wilayah yang dilakukan oleh pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya.

Nagorno-Karabakh pun juga turut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Azerbaijan pada tahun 1991. Perang pun meletus. Azerbaijan tidak ingin kehilangan wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia turut membantu perjuangan dari masyarakat Nagorno-Karabakh dengan mengokupasi dan menolak keputusan dari Dewan Keamanan PBB (DKPBB).<sup>1</sup> Puncaknya pada 6 Januari 1992 Nagorno-Karabakh benar-benar merdeka dari Azerbaijan. Untuk Azerbaijan dan Armenia misalnya. Menurut Fariz Ismailzade menyebutkan bahwa kedua negara tersebut berada dalam *maximalist position*.<sup>2</sup>

Dalam konflik tersebut kepentingan etnis menjadi salah satu pertimbangan Turki dalam membantu Azerbaijan. Turki dan Azerbaijan merupakan dua negara yang memiliki persamaan etnis. Seringkali hubungan kedua negara direpresentasikan melalui motto '*one nation, two states*.'<sup>3</sup> Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, Turki kemudian turut mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh dengan mengutuk Armenia sebagai *aggressor*<sup>4</sup> dan menutup perbatasan di Dogu Kapi dan Igdirdir yang berbatasan dengan wilayah barat Armenia.<sup>5</sup>

Selain dipengaruhi oleh Konflik Nagorno-Karabakh, renggangnya hubungan Turki dan Armenia juga dilatarbelakangi oleh upaya Armenia dalam menggalang pengakuan internasional terhadap aksi genosida yang menurut Armenia dilakukan oleh pihak Turki pada

<sup>1</sup> Bulent Aras & Fatih Ozbay, *Turkish-Armenian Relations: Will Football Diplomacy Work?*, [http://www.ysot.org/pdfs/SETA\\_Policy\\_Brief\\_No\\_24\\_Bulent\\_Aras\\_Fatih\\_Ozbay.pdf](http://www.ysot.org/pdfs/SETA_Policy_Brief_No_24_Bulent_Aras_Fatih_Ozbay.pdf) (diakses pada 11 Mei 2014)

<sup>2</sup> Dalam artikelnya, Fariz Ismailzade, menggambarkan *maximalist position* sebagai suatu keadaan Azerbaijan dan Armenia yang lebih memilih (*prefer*) untuk tetap mempertahankan *status quo* terkait dengan wilayah Nagorno-Karabakh meskipun kedua negara tidak ingin melepaskan wilayah Nagorno-Karabakh. Sehingga Azerbaijan menolak ide kemerdekaan Nagorno-Karabakh, begitu pula dengan Armenia yang juga menolak wilayah Nagorno-Karabakh *reintegrated* dengan Azerbaijan.

<sup>3</sup> "Azerbaijan, Turkey are 'One Nation, Two States,' Say Foreign Ministers", *Asbarez*, <http://asbarez.com/65154/azerbaijan-turkey-are-one-nation-two-states-say-foreign-ministers/> (diakses pada 12 Januari 2015)

<sup>4</sup> Fariz Ismailzade, *The Geopolitics of Nagorno-Karabakh Conflict*, <http://worlddialogue.org/content.php?id=354> (diakses pada 12 Januari 2015)

<sup>5</sup> Eric Palomaa, "Turkey, Armenia Engage in Football Diplomacy", *World Politics Review*, <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/2694/turkey-armenia-engage-in-football-diplomacy> (diakses pada 1 Oktober 2013)

tahun 1915. Genosida ini dilakukan ketika era Kekaisaran Ottoman yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Sekitar 1,5 juta warga negara Armenia menjadi korban genosida karena dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak terhadap Kekaisaran Ottoman dan bekerjasama dengan Rusia untuk menyerbu kekaisaran.<sup>6</sup> Namun pemerintah Turki menolak tuduhan genosida dan justru memberikan penawaran kepada Armenia untuk membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki lebih lanjut peristiwa genosida.<sup>7</sup> Pada akhirnya, tindakan penolakan Turki tersebut dibalas oleh The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA), dengan melakukan pembunuhan terhadap 34 diplomat Turki yang tersebar di seluruh dunia pada rentang tahun 1975-1982. Tindakan ASALA ini merupakan sebagai bentuk upaya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Turki yang dianggap telah melakukan genosida.<sup>8</sup>

Hubungan antara Turki dan Armenia mulai mencair pada tahun 2008 melalui upaya normalisasi. Upaya normalisasi ditandai dengan kunjungan Presiden Turki, Abdullah Gul, yang menerima undangan dari Presiden Armenia, Serzh Sarkisian, untuk menyaksikan bersama pertandingan kualifikasi sepak bola Piala Dunia 2010 antara tim nasional Armenia dengan tim nasional Turki di Yerevan, Armenia.<sup>9</sup> Berikut adalah kutipan undangan resmi dari presiden Armenia untuk Turki seperti yang dilansir oleh *Wall Street Journals* (2008) dalam artikel Tarek Hohberg:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Palomaa, "Turkey, Armenia Football Diplomacy"

<sup>7</sup> Nona Mikhleidze, *The Turkish-Armenian Rapprochement at the Deadlock* <http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1005.pdf> (diakses pada 11 Mei 2014)

<sup>8</sup> David L. Phillips, *Diplomatic History: The Turkey-Armenia Protocols*, [http://hrcolumbia.org/peacebuilding/diplomatic\\_history.pdf](http://hrcolumbia.org/peacebuilding/diplomatic_history.pdf) (diakses pada 11 Mei 2014)

<sup>9</sup> Kualifikasi Piala Dunia 2010 Zona Eropa memperebutkan tiket Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Turki dan Armenia berada dalam satu grup. Pertemuan ini juga disebut dengan *football diplomacy*.

<sup>10</sup> Tarek Hohberg, *When Diplomats Score: The Role of Football in the Turkish-Armenian Rapprochement*, [http://www.ge.boell.org/downloads/Role\\_of\\_Football-Hohberg.pdf](http://www.ge.boell.org/downloads/Role_of_Football-Hohberg.pdf) (diakses pada 1 Oktober 2013)

“Just as the people of China and the United States shared enthusiasm for ping pong before their governments fully normalized relations, the people of Armenia and Turkey are united in their love for football. [...] I hereby invite President Gul to visit Armenia to enjoy the match together with me in the stadium.”

Upaya normalisasi disambut antusias oleh pemerintah Armenia. Untuk memudahkan jalannya upaya normalisasi tersebut, pemerintah Armenia bahkan tidak mengajukan persyaratan apapun kepada Turki dan juga berharap kepada Turki untuk melakukan hal yang sama.<sup>11</sup> Antusiasnya Armenia ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dari Armenia itu sendiri. Konflik Russo-Georgia pada tahun 2008 turut berpengaruh dalam sikap Armenia ini. Dalam hal ini, perdagangan luar negeri Armenia sangat bergantung pada pelabuhan Poti di Georgia. Pada konflik Russo-Georgia, pelabuhan tersebut menjadi sasaran tembak dari pasukan militer Rusia sehingga mengalami kerusakan yang cukup berat. Kejadian tersebut berdampak cukup signifikan terhadap memburuknya perekonomian Armenia dan menggugah pemerintah Armenia untuk merumuskan kembali kebijakan luar negeri dan pandangan geopolitiknya, yang dalam hal ini dalam ruang lingkup regional, untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Oleh sebab itu Armenia mengupayakan normalisasi dengan Turki.<sup>12</sup> Upaya normalisasi juga merupakan upaya konkret dari kebijakan Turki untuk wilayah Kaukasus yaitu *the Caucasian Stability and Cooperation Pact* (CSCP) yang dibentuk pada tahun 2008. Sehingga upaya normalisasi ini dijadikan sarana bagi Turki untuk mengajak negara-negara di wilayah Kaukasus, yakni Georgia, Azerbaijan, dan termasuk Armenia, untuk turut serta berperan aktif dalam terciptanya keamanan dan stabilitas regional. Pemerintahan Turki beranggapan bahwa

---

<sup>11</sup>Aras & Ozbay, *Will Football Diplomacy Work?*

<sup>12</sup>Aras & Ozbay, *Will Football Diplomacy Work?*

stabilitas regional dapat membawa dampak positif terhadap negara-negara di wilayah tersebut, yakni pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.<sup>13</sup>

Setahun berikutnya, pada tahun 2009, perwakilan dari Turki dan Armenia yang diwakili oleh masing-masing menteri luar negeri, Ahmet Davutoglu dan Edward Nalbandian bertemu di Zurich, Swiss, untuk menandatangani protokol diplomatik dalam upaya normalisasi Turki dengan Armenia yang dibantu oleh Swiss sebagai mediator, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Micheline Calmy-Rey. Tidak hanya Swiss, penandatanganan protokol turut dihadiri oleh petinggi negara lain, seperti Amerika Serikat yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Kouchner.<sup>14</sup> Protokol mencakup beberapabidang, seperti perdagangan, ekonomi, dan budaya, yang secara khusus berada dalam ruang lingkup kerangka kerja (*framework*) organisasi regional maupun internasional.<sup>15</sup>

Jalannya upaya normalisasi tersebut, meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa negara besar, juga dibarengi oleh sentimen dari pihak Azerbaijan. Adanya upaya normalisasi tersebut dianggap oleh pihak Azerbaijan akan memperburuk konflik Nagorno-Karabakh dan dapat mengancam keamanan dari Azerbaijan<sup>16</sup> atau juga dapat dikatakan sebagai *zero-sum-game*.<sup>17</sup> Sebagai bentuk konkret sentimen pemerintah Azerbaijan tersebut, presiden

<sup>13</sup> Aybars Gorgulu, *Towards a Turkish-Armenian Rapprochement?*, [http://www.sabanciuniv.edu/HaberlerDuyurular/Documents/DD20090428171230/Insight\\_Turkey\\_Aybars.pdf](http://www.sabanciuniv.edu/HaberlerDuyurular/Documents/DD20090428171230/Insight_Turkey_Aybars.pdf) (diakses pada 6 September 2014)

<sup>14</sup> Mikhleidze, *Rapproachment at the Deadlock*

<sup>15</sup> Mikhleidze, *Rapproachment at the Deadlock*

<sup>16</sup> "Turkey, Armenia Pursue Football Diplomacy", *Fox News*, 13 Oktober 2009, <http://www.foxnews.com/story/2009/10/13/turkey-armenia-pursue-football-diplomacy/> (diakses pada 1 Oktober 2014)

<sup>17</sup> Alexander Iskandryan, *Armenian-Turkish Rapproachment: Timing Matters*, [http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/insight\\_turkey\\_vol\\_11\\_no\\_3\\_2009\\_iskandryan.pdf](http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/insight_turkey_vol_11_no_3_2009_iskandryan.pdf) (diakses pada 1 Oktober 2013)

Azerbaijan, Ilham Aliyev, memboikot kunjungannya ke Istanbul, Turki, untuk menghadiri *Alliance of Civilisations Summit* yang digelar pada bulan April 2009.<sup>18</sup>

Pada tahap berikutnya, dokumen protokol yang telah ditandatangani perlu diratifikasi oleh masing-masing parlemen dari kedua negara. Namun pada kenyataannya, ratifikasi protokol diplomatik dari kedua negara tidak dilakukan oleh parlemen kedua negara hingga saat ini. Hal ini kemudian membuat upaya normalisasi hubungan diplomatik Turki dan Armenia terhambat. Terhambatnya upaya normalisasi tersebut kemudian oleh penulis dikaitkan dengan adanya tindakan dari Azerbaijan yang turut berpengaruh, khususnya terhadap Turki, yang didasarkan pada tindakan Presiden Azerbaijan yang membatalkan kunjungannya ke *Alliance of Civilisations Summit* secara sepihak.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa Azerbaijan berpengaruh terhadap Turki sehingga normalisasi hubungan diplomatik antara Turki dengan Armenia terhambat.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan faktor eksternal, yaitu negara, yang berpengaruh terhadap tindakan dan tanggapan negara lain.

Penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Menjelaskan sumber-sumber daya apa yang menentukan Azerbaijan berpengaruh terhadap Turki.

---

<sup>18</sup> Zaur Shiryev & Celia Davies, *The Turkey-Armenia-Azerbaijan Triangle: The Unexpected Outcomes of the Zurich Protocols*, <http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2013/06/Shiryev-Davies.pdf> (diakses pada tanggal 6 September 2014)

2. Memerlihatkan tanggapan Turki terhadap tindakan yang dilakukan oleh Azerbaijan dan apa yang menjadi pertimbangan Turki terhadap tindakan tersebut.
3. Menjelaskan berhasil atau tidaknya Azerbaijan dalam pengaruhnya terhadap Turki.

#### I.4 Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi suatu negara dalam hubungan internasional. Melalui kebijakan luar negeri, negara akan berupaya untuk mencapai kepentingannya dengan interaksinya dengan negara lain, secara bilateral maupun multilateral yang mencakup beberapa bidang kerjasama. Namun kebijakan luar negeri suatu negara sewaktu-waktu dapat berubah. Terdapat dua variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri, yakni internal dan eksternal. Dalam bagan tersebut, selain adanya pengaruh dari faktor internal, kita dapat melihat bahwa terdapat dua faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri, sistem internasional dan tindakan atau aksi dari negara lain (lihat tabel 1.1). Dari dua faktor eksternal tersebut, yang menjadi fokus dari penulis adalah tindakan atau aksi dari negara lain (*behavior of other countries*).

Tabel I.1 Variabel yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri

Figure 1. Variables that influence foreign policy			
External variables	Internal variables		
	Context	Actors	Resources
International system	Political system	Government	Geographic
	Development strategy		Economic
Behaviour of other countries	Cultural and historical factors	Non-governmental	Military
			Demographic
			Diplomatic

*Source: Based on Van Klaveren, 2002, p. 177.*

Sumber: Gonnet, Diego dan Diego Hernandez, 2008

Faktor eksternal ini merupakan konsekuensi dari perumusan kebijakan luar negeri itu sendiri dalam hubungan internasional yang dapat memicu tanggapan positif maupun negatif dari negara lain. Untuk tanggapan negatif, hal ini dikaitkan dengan kebijakan luar negeri suatu negara yang mendapat penolakan karena tidak sesuai dengan kepentingan negara lain sehingga tercipta suatu proses yang dapat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri. Seperti misalnya negara A merumuskan kebijakan luar negeri X, namun negara B merespon negatif kebijakan luar negeri negara A dan berusaha untuk mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri negara A menjadi kebijakan luar negeri Y untuk mempertahankan tujuannya yang mencakup gengsi, wilayah, bahan mentah, keamanan atau bahkan persekutuan. Sehingga, dalam hal ini, sumber daya menjadi salah satu variabel yang cukup penting oleh karena dengan menggunakan atau memobilisasi sumber daya itu sendiri merupakan alat untuk membujuk, memberi imbalan, mengancam atau menghukum, sehingga negara B akan mampu berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri negara A.<sup>19</sup>

Untuk menentukan berpengaruh atau tidaknya negara B dapat dilihat pada tanggapan negara A yang akan merubah atau tidak kebijakan luar negerinya.<sup>20</sup> Dari analogi tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat tiga variabel dalam perubahan kebijakan luar negeri, antara lain 1) tindakan mempengaruhi negara lain; 2) sumber yang digunakan untuk membuat pengaruh; dan 3) tanggapan terhadap tindakan tersebut.<sup>21</sup>

#### Bagan I.1 Variabel dalam Mempengaruhi Negara Lain



<sup>19</sup>Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 4<sup>th</sup> ed. (Prentice-Hall, Inc., 1983), 159.

<sup>20</sup>Holsti, *International Politics*, 168.

<sup>21</sup>Holsti, *International Politics*, 160.



Sumber: Holsti, 1983

Pada bagan diatas kita dapat melihat bahwa tiga variabel yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan, sumber daya, dan tanggapan, akan menghasilkan kemungkinan suatu negara dalam keberhasilannya untuk mempengaruhi negara lain. Dalam hal ini, kebutuhan suatu negara cukup menentukan keberhasilan tindakan pengaruh yang dilakukan oleh negara lain. Dalam unsur ini, Kalevi J. Holsti menamakannya dengan hubungan ketergantungan atau sejauh mana terdapat kebutuhan diantara dua negara dalam suatu hubungan pengaruh, khususnya dalam hal sumber daya alam.<sup>22</sup>

Berangkat dari konsep tersebut, terdapat dua macam negara, negara yang butuh (negara 'kuat') dan negara yang dibutuhkan (negara 'lemah'). Menurut Holsti, negara 'kuat' berada pada posisi yang rawan terhadap tuntutan dan tindakan pengaruh dari negara 'lemah'. Oleh karena itu, negara 'lemah', dalam banyak hal, memperoleh berbagai konsesi dari 'kuat' tersebut.<sup>23</sup> Dalam bukunya, Kalevi J. Holsti menganalogikan negara 'kuat' adalah negara Eropa, Prancis dan Jerman, serta negara 'lemah' dianalogikan dengan negara-negara Timur Tengah. Dalam analogi ini, negara-negara Eropa tersebut sangat bergantung terhadap pasokan sumber daya dari negara-negara Timur Tengah, yaitu minyak. Namun sebaliknya, negara-negara Timur Tengah tidak terlalu bergantung kepada kedua negara Eropa tersebut, oleh karena mereka akan mampu menjual pasokan minyak ke negara lain selain Prancis dan Jerman. Sehingga dari analogi itu kita dapat melihat bahwa negara-negara Timur Tengah berada di posisi yang menguntungkan, sedangkan posisi Prancis dan Jerman pada posisi yang 'rawan'. Oleh karenanya, negara-negara Timur Tengah dapat menuntut atau melawan tuntutan yang diajukan kepadanya oleh Prancis dan Jerman serta akan memperoleh konsesi penting ke depannya. Sementara bagi Prancis dan Jerman, seperti tidak ada yang bisa

---

<sup>22</sup>Holsti, *International Politics*, 166.

<sup>23</sup>Holsti, *International Politics*, 166.

dilakukan lagi selain memberi konsesi penting kepada negara-negara Timur Tengah tersebut atau pasokan minyak dari Timur Tengah dihentikan.

Ketergantungan akan sumber daya alam kemudian dikaitkan dengan geopolitik energi. Pasca era Perang Dingin, aktivitas industri global mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data dari *Energy Information Agency* (EIA) seperti yang tercantum dalam artikel Bradley L. Bowman, EIA memperkirakan peningkatan konsumsi energi global sekitar 71% dalam rentang waktu 2003 hingga 2030.<sup>24</sup> Peningkatan aktivitas industrialisasi berujung pada semakin meningkat pula permintaan akan konsumsi energi suatu negara, yang dalam hal ini adalah minyak dan gas alam.<sup>25</sup>

Hal ini kemudian juga berpengaruh terhadap pandangan geopolitik suatu negara. Dalam geopolitik energi, kepemilikan atau kontrol atas *pipeline route* menjadi krusial bagi suatu negara. Dengan adanya *pipeline route* tersebut menjamin keamanan pasokan energi dari negara yang bersangkutan sehingga hal ini juga akan mendorong *geopolitical concerns* suatu negara untuk tetap menjaga kontrol *pipeline route* tersebut.

“As global energy consumption continues to rise, there is more competition than ever over access to resources, and more attention is being given to protecting energy supply routes.”<sup>26</sup>

## I.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia mengalami hambatan. Azerbaijan sebagai faktor eksternal berpengaruh terhadap terhambatnya upaya normalisasi tersebut

<sup>24</sup> Bradley L. Bowman, *After Iraq: U.S. Military posture in the Middle East*, <http://csis.org/files/publication/twq08springbowman.pdf> (diakses pada 3 Desember 2014)

<sup>25</sup> Bezen Alamir Coskun & Richard Carlson, *New Energy Geopolitics: Why Does Turkey Matters?*, <http://osam.zirve.edu.tr/tr/files/16-Bezen-Richard03.pdf> (diakses pada 15 Januari 2014)

<sup>26</sup> Coskun & Carlson, *New Energy Geopolitics*

melalui mobilisasi beberapa sumber daya. Kemudian ketergantungan energi Turki juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Turki dalam menanggapi beberapa tindakan yang dilakukan Azerbaijan.

## **I.6 Metodologi Penelitian**

### **I.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep**

#### **I.6.1.1 Normalisasi**

Menurut Ronald Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, mengartikan normalisasi sebagai suatu proses yang menyangkut pengakuan adanya kebutuhan yang berujung untuk mengurangi ketegangan atau friksi, mempromosikan improvisasi atau perbaikan hubungan, dan menyelesaikan sumber utama perselisihan dan ketegangan secara keseluruhan atau sebagian.<sup>27</sup> Normalisasi ini kemudian dikaitkan dengan adanya *abnormal relations* aktor-aktor yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan *abnormal relations* disini adalah adanya perubahan dalam hubungan antara negara dengan negara atau negara dengan aktor non-negara. Perubahan hubungan tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya isu atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya gangguan, ketegangan, atau permusuhan (*animosity*) antara para pihak.<sup>28</sup> Puncak dari proses normalisasi atau hubungan antarnegara dapat dikatakan normal adalah ketika penghapusan segala pembatasan atau larangan dan terjalinnya hubungan diplomatik.<sup>29</sup>

Namun dalam prosesnya, upaya normalisasi tersebut dapat terhambat bila terdapat perkembangan *abnormal relations* dalam bidang politik.<sup>30</sup> Perkembangan kondisi tersebut kemudian semakin menyulitkan upaya normalisasi kedua negara atau lebih. Bahkan

<sup>27</sup> Ronald Barston, *Modern Diplomacy* (London: Pearson Longman, 2008), 246.

<sup>28</sup> Barston, *Modern Diplomacy*, 246

<sup>29</sup> Barston, *Modern Diplomacy*, 251

<sup>30</sup> Barston, *Modern Diplomacy*, 246

terhambatnya upaya normalisasi tersebut dapat menjadi 'keuntungan' bagi salah satu pihak atau semua pihak yang terkait dalam upaya normalisasi dengan meningkatkan perbedaan yang kemudian disertai tindakan oleh salah satu pihak untuk meningkatkan masalah (*escalate the problem*) dan meninggalkan atau mengabaikan (*abandon*) upaya normalisasi.<sup>31</sup> Kaitannya dalam topik ini adalah upaya normalisasi Turki dengan Armenia diupayakan oleh karena adanya *abnormal relations* diantara keduanya, yang mana diakibatkan oleh konflik Nagorno-Karabakh dan kasus genosida terhadap warga Armenia oleh Kerajaan Ottoman pada tahun 1915.

### I.6.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara diidentikkan dengan perilaku negara yang bersangkutan dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu sarana dan upaya konkret bagi suatu negara untuk tercapai kepentingannya serta untuk menghadapi negara lain. Maksudnya adalah kebijakan luar negeri merupakan pelaksanaan spesifik dari suatu negara sebagai suatu inisiatif atau suatu reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain.<sup>32</sup> Kebijakan luar negeri disini kemudian diidentikkan dengan kegiatan resmi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh agen resmi atau agen yang ditunjuk (*authorized agents*) dari suatu negara sebagai orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan yang merujuk pada lingkungan eksternal negara terkait.<sup>33</sup> Upaya normalisasi dapat dikatakan sebagai kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Turki terhadap Armenia. Mengingat adanya keinginan Turki untuk menciptakan stabilitas regional, yang dalam konteks ini adalah wilayah Kaukasus Selatan, yang pada saat itu terjadi konflik Russo-Georgia.

<sup>31</sup> Barston, *Modern Diplomacy*, 246.

<sup>32</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relation Dictionary* (England: Clio Press Ltd, 1982), 5

<sup>33</sup> M. Fatih Tayfur, *Main Approaches to the Study of Foreign Policy: A Review*, [http://www.metu.edu.tr/~tayfur/reading/main\\_approaches.pdf](http://www.metu.edu.tr/~tayfur/reading/main_approaches.pdf) (diakses pada 13 Januari 2015)

### I.6.1.3 Ketergantungan

Terdapat dua ciri umum dalam menjelaskan ketergantungan seperti yang dijabarkan oleh Vincent Ferraro, yakni ketergantungan merupakan suatu sistem internasional yang mana terdapat dua negara yang berinteraksi.<sup>34</sup> Sementara itu untuk ciri yang kedua, ketergantungan dikaitkan dengan kekuatan eksternal yang posisinya fundamental bagi *dependent states*. Hubungan antarnegara tersebut dapat digambarkan sebagai negara dominan dan negara yang bergantung (*dominan/dependent*). Kemudian ketergantungan ini dapat diketahui dalam beberapa isu, antara lain militer, ekonomi, dan teknologi.<sup>35</sup> Secara khusus untuk ketergantungan dalam bidang ekonomi ini kemudian dikaitkan dengan kebutuhan suatu negara dalam mengembangkan perekonomiannya dalam menghadapi perekonomian dunia.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, ketergantungan dalam bidang ekonomi dikaitkan dengan ketergantungan energi Turki terhadap Azerbaijan. Oleh karena tingginya kebutuhan domestik gas Turki yang berbanding terbalik dengan produksi gas domestik serta adanya hubungan antara konsumsi gas Turki dengan pertumbuhan ekonominya.

### I.6.1.4 Tanggapan

Dalam hubungan internasional, antara dua negara atau lebih akan berinteraksi. Sehingga kemudian interaksi tersebut akan menciptakan suatu ‘aksi-reaksi’ atau akan memunculkan tanggapan dari suatu negara terhadap tindakan atau kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan.<sup>37</sup> Tanggapan ini juga dapat menjadi indikator untuk menentukan seberapa pengaruhkah suatu negara dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri negara lain.

<sup>34</sup> Vincent Ferraro, *Dependency Theory: An Intrduction*, [http://marriottschool.net/emp/WPW/pdf/class/Class\\_6-The\\_Dependency\\_Perspective.pdf](http://marriottschool.net/emp/WPW/pdf/class/Class_6-The_Dependency_Perspective.pdf) (diakses pada 11 Mei 2014)

<sup>35</sup> Graham Evans & Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations* (London: Penguin Books Ltd, 1998), 121

<sup>36</sup> Evans & Newnham, *Dictionary of International Relations*, 121

<sup>37</sup> Free Dictionary, *Respond*, <http://www.thefreedictionary.com/respond> (diakses pada 11 Mei 2014)

Jika negara A dapat membuat negara B melakukan X, maka dalam kasus tersebut negara A mempunyai pengaruh, begitu pula sebaliknya.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, interaksi antara Azerbaijan dengan Turki dapat dijadikan acuan. Azerbaijan melakukan beberapa aksi atau tindakan untuk berpengaruh terhadap Turki untuk menghambat upaya normalisasinya dengan Armenia sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kepentingannya. Sementara itu reaksi Turki terkait dengan tindakan Azerbaijan tersebut meliputi tanggapan, apakah Turki akan mendukung, netral, atau bahkan menjauhi Azerbaijan.

### **I.6.1.5 Pengaruh**

Dalam bukunya, Kalevi J. Holsti menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh dari suatu negara terhadap negara lain dijalankan. Dalam penjelasannya tersebut, terdapat enam taktik berbeda yang menyangkut tindakan, antara lain adalah persuasi, tawaran imbalan, pemberian imbalan, ancaman hukuman, tindakan hukuman tanpa kekerasan, dan kekerasan.<sup>39</sup> Untuk kaitannya dengan pengaruh Azerbaijan dalam upaya normalisasi Turki dengan Armenia, taktik yang dilakukan adalah dengan ancaman hukuman, yang mana ancaman hukuman yang dimaksud adalah Azerbaijan mengancam Turki dalam menahan imbalan atau keuntungan yang telah Azerbaijan berikan kepada Turki, yakni kerjasama energi.

### **I.6.1.6 Faktor Eksternal**

Selain faktor internal, faktor eksternal merupakan salah satu faktor penentu atau determinan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal, salah satunya adalah negara. Dalam hal ini negara dapat berpengaruh signifikan terhadap proses formulasi atau implementasi kebijakan luar negeri negara lain melalui tindakan yang dilakukan. Kaitannya dengan konteks ini adalah

<sup>38</sup> Holsti, *International Politics*, 168.

<sup>39</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing enam taktik tersebut, baca buku Kalevi J. Holsti Kalevi J. Holsti, *International Politics*, 4<sup>th</sup> ed. (Prentice-Hall, Inc., 1983), 170-171

Azerbaijan, negara yang berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Turki, yakni upaya normalisasinya dengan Armenia.

### **I.6.1.7 Sumber Daya**

Robert Dahl dalam buku yang ditulis oleh Kalevi J. Holsti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya dibagi menjadi dua, yakni sumber daya nyata dan sumber daya yang tidak nyata. Untuk yang termasuk ke dalam sumber daya nyata adalah uang, kekayaan, informasi, waktu, sekutu politik, kedudukan resmi, dan pengendalian atas pekerjaan. Sementara untuk kepribadian dan kualitas kepemimpinan termasuk ke dalam sumber daya tidak nyata.<sup>40</sup> Kalevi J. Holsti kemudian menambahkan dengan menggunakan pengukuran sumber daya, sehingga sumber daya ini dikaitkan dengan unsur kekuasaan.<sup>41</sup> Data perbandingan yang berhubungan dengan produksi bijih besi, batu bara, tenaga air, dan gas alam, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, sumber daya militer, sistem transportasi, dan sumber daya bahan mentah merupakan indikator kekuasaan suatu negara.<sup>42</sup> Dalam kaitannya dengan upaya konkret dari pengaruh Azerbaijan terhadap upaya normalisasi, adalah Azerbaijan menggunakan beberapa sumber dayanya untuk berpengaruh terhadap Turki sehingga berdampak cukup signifikan terhadap upaya normalisasinya dengan Armenia. Selain itu, penggunaan sumber daya itu nantinya juga berpengaruh terhadap kelanjutan hubungan antara Turki dengan Azerbaijan.

### **I.6.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel yang dihipotesiskan, untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berhubungan ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah sesuatu variabel

---

<sup>40</sup>Holsti, *International Politics*, 163.

<sup>41</sup>Holsti, *International Politics*, 164.

<sup>42</sup>Holsti, *International Politics*, 164.

disebabkan/dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya.<sup>43</sup> Penelitian ini memberikan penjelasan terkait dengan pengaruh Azerbaijan terhadap Turki dalam kebuntuan upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Turki dengan Armenia.

### **I.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada tahun 2009-2013. Hal ini didasarkan pada momentum terhambatnya upaya normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia melalui pada tahun 2009 dan hingga pada tindakan Azerbaijan serta tanggapan Turki terhadap tindakan tersebut pada tahun 2013. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tentu akan banyak dinamika sehingga akan berpengaruh terhadap proses penelitian.

### **I.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka atau studi kepustakaan. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membaca literatur hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti.<sup>44</sup> Penulis berusaha mendapatkan literatur melalui media internet. Melalui media ini penulis mencari sumber bacaan via situs Google ([www.google.com](http://www.google.com) atau [www.google.co.id](http://www.google.co.id)) untuk mendapatkan sumber bacaan berupa media massa dan buku atau literatur dalam bentuk *soft copy* atau *Portable Document Format* (PDF) yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **I.6.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena dalam penelitian data-data diolah berupa kata-kata dengan sedikit data yang berupa angka. Data ini

---

<sup>43</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 21.

<sup>44</sup> Laura Roselle & Sharon Spray, *Scholarly Literature and the Literature Review*, dalam *Research and Writing in International Relations* (New York: Pearson Longman, t.t.), 17.



dikumpulkan dalam aneka macam cara, yang dalam hal ini penulis dapatkan melalui kajian pustaka atau studi kepustakaan.<sup>45</sup> Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>46</sup>

Analisis pertama, reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis.<sup>47</sup> Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Data kualitatif yang didapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat atau melalui ringkasan. Sehingga melalui kegiatan reduksi data, dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga terdapat kesimpulan yang dapat diverifikasi.

Analisis kedua, penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>48</sup> Dengan melihat penyajian data akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Sementara itu, untuk analisis yang terakhir, menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan atau juga merupakan suatu upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data lain. Dalam kegiatan analisis ini mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan konfigurasi yang mungkin serta menangani kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, 16.

<sup>46</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Sage Publications Inc, 1992), 16-20

<sup>47</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 16.

<sup>48</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 17.

<sup>49</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 19.

### **I.6.6 Sistematika Penulisan**

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tipe penelitian, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data.

BAB II Menjelaskan bagaimana pengaruh Azerbaijan terhadap Turki sehingga berdampak kepada terhambatnya upaya normalisasi Turki dan Armenia.

BAB III Menjelaskan mengenai tanggapan Turki terhadap tindakan Azerbaijan dan kelanjutan hubungan bilateral Turki dengan Azerbaijan.

BAB IV Menganalisis pengaruh Azerbaijan terhadap Turki dengan mengaitkan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti.

BAB V Berisi kesimpulan dan pembuktian hipotesis.

